

**PLURALISME HUKUM DALAM PENDAFTARAN
HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
NAGARI SUNGAI KAMUYANG**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**PLURALISME HUKUM DALAM PENDAFTARAN
HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT
NAGARI SUNGAI KAMUYANG**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**



**Pembimbing I :
Prof. Dr. Erwin, M.Si
Pembimbing II :
Dr. Yevita Nurti, M. Si**

**PROGRAM MAGISTER ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Nama : Uzika Putri Fatasa
 Program Studi : Magister Antropologi
 Judul : Pluralisme Hukum Dalam Pendaftaran Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang
 Pembimbing I : Prof. Dr. Erwin, M.Si
 Pembimbing II : Dr. Yevita Nurti, M. Si

Tanah ulayat bagi masyarakat adat Minangkabau merupakan komponen adat yang terintegrasi dan tidak terpisahkan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konflik agraria yang melibatkan tanah ulayat semakin sering terjadi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan kebijakan Pendaftaran Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Ulayat Nagari. Salah satu implementasi kebijakan ini adalah penerbitan Sertifikat Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang pada 10 Oktober 2023 dengan luas 371.095 m². Namun kebijakan ini tidak serta-merta didukung seluruh kelompok masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang yang menciptakan kegagalan mengharmoniskan tradisi lokal dengan kebijakan formal negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman kelompok masyarakat terhadap tanah ulayat nagari, mengeksplorasi proses dan dinamika HPL tanah ulayat dan juga menganalisis pluralisme hukum yang menimbulkan perbedaan pandangan terhadap HPL di Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* sebab kriteria dari unit penelitian berdasarkan kelompok masyarakat berdasarkan jabatan atau profesinya. Kelompok tersebut antara lain adalah; Kelompok dari jajaran Wali Nagari, Kelompok Niniak Mamak (Kerapatan Adat Nagari), Kelompok Bundo Kanduang, Kelompok BP Ulayat dan Kelompok Petani.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pluralisme hukum berakar kepada perbedaan pemaknaan terhadap tanah ulayat di antara berbagai kelompok masyarakat. Petani memandang kebijakan Pendaftaran Tanah sebagai ancaman terhadap hak milik yang didasarkan pada penggarapan tanah lebih dari 20 tahun. Sementara itu, KAN dan Bundo Kanduang melihat kebijakan ini sebagai ancaman terhadap sistem kepemilikan komunal berbasis hukum adat. Sebaliknya, Pemerintah Nagari dan Badan Pengawas Ulayat mendukung kebijakan ini sebagai bentuk legitimasi hukum formal sesuai dengan regulasi negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya harmonisasi antara kebijakan negara dan nilai-nilai adat masih menghadapi dinamika dalam prosesnya mulai dari tidak dilibatkannya kelompok petani, adanya perselisihan tapal batas internal, tidak adanya upaya penyelesaian konflik internal oleh ATR/BPN dan juga adanya faktor kepentingan oleh *stakeholder*. Kontras pandangan dan juga dinamika ini mengakibatkan tidak terakomodirnya hak adat secara komprehensif terlebih pada kelompok marjinal seperti petani dan kelompok adat yakni KAN dan Bundo Kanduang.

Kata Kunci : Pluralisme Hukum; Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah Hak Pengelolaan, Nagari Sungai Kamuyang, Antropologi Hukum

ABSTRACT

Nama : Uzika Putri Fatasa
 Program Studi : Master Anthropology
 Judul : Legal Pluralism in the Registration of Customary Land Management Rights in Nagari Sungai Kamuyang
 Pembimbing I : Prof. Dr. Erwin, M.Si
 Pembimbing II : Dr. Yevita Nurti, M. Si

Customary land for the Minangkabau indigenous community is an integrated and inseparable component of adat. However, in recent decades, agrarian conflicts involving customary land have become more frequent. To provide legal certainty for indigenous peoples, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) issued the Nagari Ulayat Land Management Rights (HPL) Registration policy. One of the implementations of this policy is the issuance of the Ulayat Nagari Sungai Kamuyang Land Certificate on October 10, 2023, with an area of 371,095 m². However, this policy is not necessarily supported by all components of society in Nagari Sungai Kamuyang. Therefore, it is important to explore the failure to harmonize local traditions with formal state policies.

This research aims to explore the understanding of community groups towards customary land of the Nagari, explore the process and dynamics of customary land HPL, and also analyze legal pluralism that causes different views on HPL in Nagari Sungai Kamuyang, Lima Puluh Kota Regency. This research uses a qualitative method with an ethnographic approach, which is conducted through observation, interviews, and document studies. The selection of informants was carried out using a purposive method because the criteria of the research unit were based on community groups based on their position or profession. The groups include the Group from the ranks of the Nagari Wali, Niniak Mamak Group (Nagari Customary Density), Bundo Kanduang Group, BP Ulayat Group, and Farmer Group.

Field findings show that legal pluralism is rooted in different interpretations of customary land among various community groups. Farmers see the Land Registration policy as a threat to property rights based on cultivating land for more than 20 years. Meanwhile, KAN and Bundo Kanduang see this policy as a threat to the customary law-based communal ownership system. In contrast, the Nagari Government and Ulayat Supervisory Board support this policy as a form of formal legal legitimacy in accordance with state regulations. These findings indicate that harmonization efforts between state policies and customary values still face dynamics in the process, ranging from the exclusion of farmer groups, internal boundary disputes, the absence of internal conflict resolution efforts by ATR / BPN, and also the existence of interest factors by stakeholders. These contrasting views and dynamics have resulted in the non-accommodation of customary rights in a comprehensive manner, especially for marginalized groups such as farmers and customary groups, namely KAN and Bundo Kanduang

Keyword : Legal Pluralism; Customary Land, Management Rights Certification, Nagari, Sungai Kamuyang, Legal Anthropology